

2015

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi

Tahun 2015

DESEMBER 2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 untuk tahun terakhir RPJMD Tahun 2010 - 2015 merupakan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 telah memuat tentang rencana kinerja dan rencana kebutuhan dana berdasarkan program prioritas untuk mencapai sasaran dari misi pembangunan.

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja Instansi pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015. Oleh karena itu, semua program prioritas beserta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan tersebut harus menjadi acuan kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 juga dapat menjadi barometer dalam pencapaian visi pembangunan provinsi Jambi yaitu Jambi Emas 2015. Disamping itu, rencana kinerja tahunan ini juga dapat dijadikan referensi dalam pengawasan terhadap implementasi dari program prioritas yang telah direncanakan, baik oleh SKPD dilingkungan pemerintah provinsi Jambi maupun oleh *stakeholders* lainnya.

Akhirnya, kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua target kinerja yang telah disusun dalam Rencana tersebut dapat tercapai dan bermanfaat.

Jambi, Desember 2014

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH



H. RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601211 198503 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Rencana Kerja	2
1.3. Manfaat Rencana Kerja	2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.1. Visi Pembangunan Daerah	3
2.2. Misi Pembangunan Daerah	4
2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	6
BAB III. PERMASALAHAN, KONDISI EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	12
3.2. Kondisi Ekonomi Daerah	26
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	36
BAB IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAERAH	
4.1. Rencana Kinerja Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Pertama	68
4.2. Rencana Kinerja Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Kedua	69
4.3. Rencana Kinerja Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Ketiga	70
4.4. Rencana Kinerja Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Keempat	71
4.5. Rencana Kinerja Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Kelima	72

BAB V. RENCANA KEBUTUHAN DANA PROGRAM PRIORITAS

5.1. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Pertama	73
5.2. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Kedua	75
5.3. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Ketiga	78
5.4. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Keempat	82
5.5. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas Untuk Pencapaian Sasaran Dari Misi Kelima.....	84

BAB VI. PENUTUP..... 88

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Jambi melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja tahunan yang baik tentu akan memuat indikator kinerja yang menjadi target pencapaian selama tahun anggaran tersebut. Sehingga rencana kinerja tahunan yang telah disusun dapat digunakan untuk menganalisis capaian kinerja sasaran dan kinerja keuangan selama tahun anggaran. Selain itu, terhadap permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan rencana kinerja tahunan akan dapat dicarikan solusi yang tepat agar tidak terulang di tahun tahun yang akan datang. Rencana kinerja mempunyai nilai strategis dalam perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dalam desain rencana kerja tahunan diperlukan objektivitas terhadap kemampuan dan daya dukung daerah. Disamping itu, diperlukan pula partisipasi aktif dan keseriusan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan daerah agar rencana kinerja pemerintah Provinsi Jambi dapat tercapai dengan baik.



1.2. Tujuan Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menetapkan strategi pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah;
- b. Menetapkan rencana kinerja tahunan daerah beserta indikatornya;
- c. Menetapkan rencana kebutuhan dana untuk pencapaian sasaran.

1.3. Manfaat Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015;
- b. Menjadi bahan masukan dalam peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2015.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2010 – 2015, yaitu :

**“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”
J A M B I E M A S 2015**

Ekonomi Maju : diartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka



pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aman : Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.

Adil : diartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.

2.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik, yaitu meningkatkan



dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;

- 2) Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya, yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;
- 3) Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- 4) Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan, yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
- 5) Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dalam memenuhi kepentingan umum, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara



konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2010 - 2015 adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik;
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya;
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan;
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum.



2.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur,
2. Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur energi dan listrik,
3. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih,
4. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan,
5. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas,
6. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah,
7. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial,
8. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat,
9. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan,
10. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan,
11. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi,
12. Terciptanya stabilitas makro ekonomi dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan,



13. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat,
14. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial,
15. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran,
16. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah,
17. Terwujudnya agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama,
18. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisata daerah,
19. Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air, Lahan dan Tambang,
20. Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar,
21. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup,
22. Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan,
23. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik,
24. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum,
25. Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah.



Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015

Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum	Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur
			Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik
			Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
			Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
			Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah
			Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
			Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat
			Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan
			Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Mewujudkan Jambi dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	berbasis Agribisnis dan Agroindustri	teknologi	mengu-rangi praktik ekonomi tinggi Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung terca-painya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran Terwujudnya agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisata daerah Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan	Menciptakan Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	Berwawasan Lingkungan	penataan ruang dan lingkungan	Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan
5	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender	Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan Umum	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan



BAB III

PERMASALAHAN, KONDISI EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Infrastruktur Daerah

Permasalahan infrastruktur daerah yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah :

1. **Kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan yang relatif belum baik.** Walaupun kinerja target jalan provinsi dalam kondisi mantap cukup baik namun permasalahan kualitas infrastruktur ini masih mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Provinsi Jambi maupun dari Provinsi Jambi ke Provinsi tetangga. Selain itu, masih terdapat desa-desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Jambi perlu dilakukan dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan laju kerusakan yang ada sehingga kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran dapat lebih terjamin. Dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, hingga saat ini juga dilihat dari perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Jambi masih perlu perhatian khusus. Hingga saat ini panjang jalan Provinsi telah mencapai 1.566,68 km dan jalan nasional sepanjang 820,40 km. Adapun kondisi jalan provinsi diklasifikasikan pada status kondisi jalan mantap sepanjang 1.126,094 km, jalan rusak ringan sepanjang 242,969 km, dan jalan rusak berat sepanjang 135,866 km.

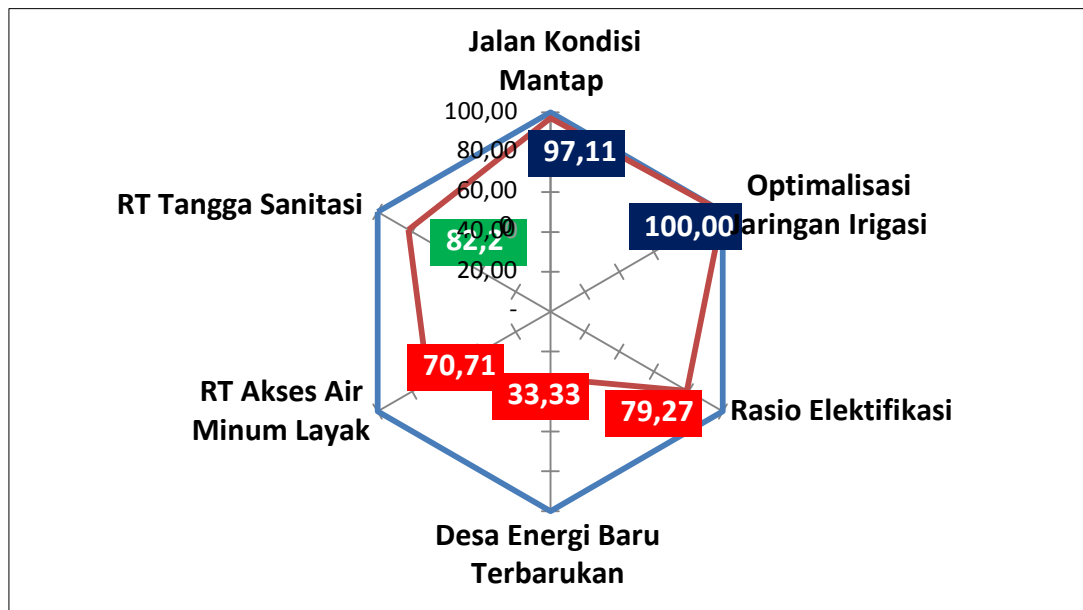


2. Sarana Prasarana transportasi sungai dan laut masih terbatas.

Transportasi sungai dan laut memiliki banyak keunggulan dibandingkan transportasi darat karena menimbulkan biaya operasional yang lebih kecil dan kapasitas angkut yang jauh lebih besar. Provinsi Jambi memiliki potensi untuk pengembangan transportasi sungai dan laut karena didukung oleh alur sungai dan posisi wilayah yang berada pada ALKI 1. Namun keterbatasan sarana prasarana moda ini membuat potensi ini kurang berkembang. Revitalisasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Jambi. Sarana prasarana perhubungan laut pun harus segera dibangun agar produk-produk Provinsi Jambi dapat dikirim langsung ke daerah tujuan dengan waktu yang lebih cepat.

3. Pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan sebagai pembangkit listrik belum optimal. Saat ini pembangkit listrik di Provinsi Jambi sebagian besar masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan tenaga diesel dengan kapasitas terbatas. Apabila potensi PLTA dan PLTMH yang ada dimanfaatkan secara optimal, maka Provinsi Jambi akan surplus energi listrik dan kelebihan tersebut dapat didistribusikan pada daerah lain.

4. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi padahal infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani karena infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya.



Gambar 3.1 Pencapaian Kinerja Indikator Prioritas 1 Tahun 2013

B. Permasalahan Sosial Budaya

Permasalahan sosial budaya yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah:

1. Pendidikan

Pada tingkat provinsi, Kota sungai Penuh menempati peringkat paling atas dengan IPM sebesar 76,76 lebih tinggi dari IPM di Kota Jambi yang berada pada peringkat kedua dengan IPM sebesar 76,07, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan IPM sebesar 71,49. Namun jika dilihat lebih jauh mengenai tingkat pendidikan penduduk khususnya penduduk yang berumur 10 tahun keatas, menunjukkan bahwa secara umum daya saing SDM Provinsi Jambi masih relatif rendah. Penduduk di atas umur 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD dan menamatkan SD/MI yang mencapai 58 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP/MI 18 persen, SMU/MA/SMK sebanyak 19 persen, sementara yang termasuk dalam jajaran berpendidikan tinggi D1 hingga S.3 hanya 5 persen.



2. Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat sehingga menyebabkan disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
- b. Kinerja pelayanan kesehatan masih rendah, yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Jambi.
- c. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
- d. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terpusat di Kota Jambi sementara di sebagian besar ibukota Kabupaten tidak memiliki sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di wilayah-wilayah terpencil.
- f. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.
- g. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- h. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

3. Kebudayaan dan Pariwisata

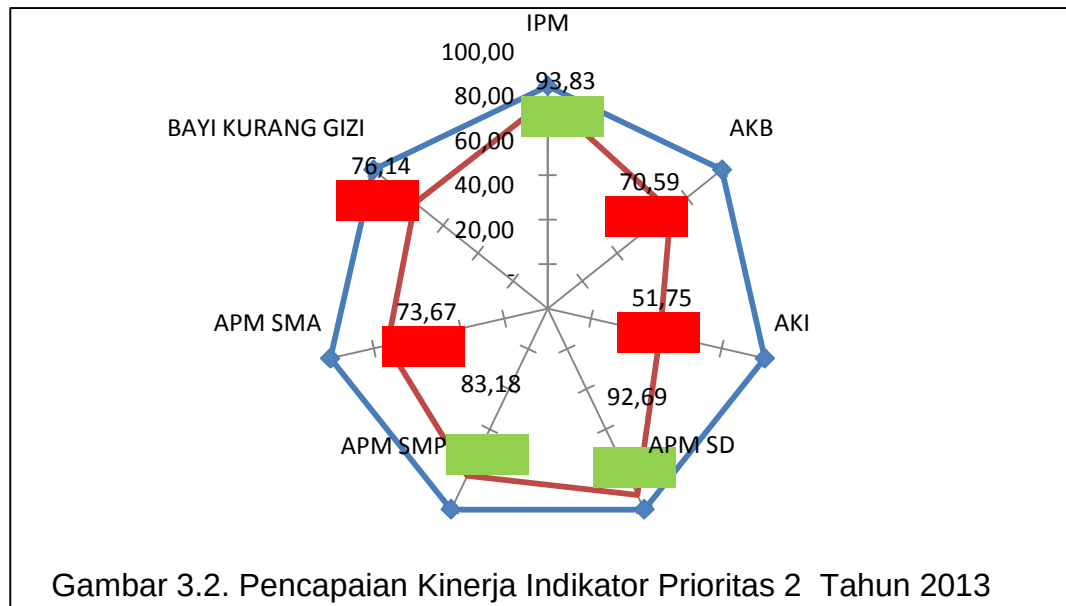
- a. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
- b. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.



- c. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
- d. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
- e. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

4. Pemuda dan Olahraga

- a. Masih banyaknya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan HIV/AIDS akibat kurang optimalnya upaya-upaya peningkatan kesadaran terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut.
- b. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
- c. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
- d. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
- e. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.



C. Permasalahan Pemerintahan dan Politik

1. Pemerintahan

- a. Pembenahan peraturan daerah hingga tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan daerah dengan peraturan pusat. Jumlah pembentukan perda Provinsi Jambi, terdiri dari tahun 2007 sebanyak 9 Perda, tahun 2008 sebanyak 14 Perda dan Tahun 2009 sebanyak 11 Perda. Selain itu pembenahan juga dilakukan melalui evaluasi dan konsultasi peraturan daerah kabupaten/Kota dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, bias gender, tidak berpihak pada kelompok miskin, dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2005 hingga Agustus 2010, terdapat sejumlah peraturan daerah kabupaten/kota yang ditolak untuk disahkan dan disarankan untuk disempurkan agar sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun



2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Efektifitas peraturan daerah juga ditentukan oleh kelembagaan penegak peraturan daerah. Selain itu untuk melaksanakan penegakan hukum juga perlu didukung oleh adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan meskipun belum cukup memuaskan. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi Pemerintah Provinsi Jambi secara keseluruhan masih belum dapat mencapai taraf optimal. Oleh karena itu masih perlu upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut.

- b. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.**
Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
- c. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh **belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya**. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan



kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat. Di samping permasalahan tersebut di atas, **budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi**. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2007-2010. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tidak mengalami kemajuan, yaitu Wajar Dengan Pengecualian, tapi paling tidak, tidak terperosok pada level yang lebih rendah Tidak Memberikan Pendapat (*adversed opinion*); Tidak Wajar (*disclaimer of opinion*). Bahkan hasil tindaklanjut rekomendasi-rekomendasi BPK RI sejak tahun 2005 hingga 2009. Dari 386 rekomendasi, 285 sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau 73,83 persen, 66 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau 17,10 persen dan 35 belum ditindaklanjuti atau 9,07 persen.



- d. **Pelayanan Publik.** Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi **belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi**, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti "Ombudsman Daerah".
- e. **Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.** Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.



2. Politik

- a. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan ada kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasi politik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas **rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik**. Kendala yang masih dihadapi adalah kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.
- b. Sampai saat ini **partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik**. Selain itu Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasarana penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem



demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.

- c. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah **penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya.** Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

D. Permasalahan Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Keuangan Daerah

- a. **Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama**
- b. **Adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah.**

2. Sumberdaya Ekonomi

- a. **Rendahnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan,**



peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.

- b. **Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri)** sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
- c. **Rendahnya pendapatan petani yang tercermin dari nilai NTP** petani masih dibawah 100. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena rendahnya pendapatan.
- d. **Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain** seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan-lahan baru.
- e. **Masih rendahnya pertambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) yang ada.**
- f. **Rendahnya produktivitas yang umumnya terdapat di daerah rawa pasang surut.**
- g. **Rendahnya kualitas beras yang dihasilkan**, karena terbatasnya mesin perontok gabah dan lantai jemur. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan,



ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian.

- h. **Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).**
- i. **Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan** sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
- j. **Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.**
- k. **Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan,** seperti armada penangkapan, *cold storage*, dan jenis alat tangkap.
- l. **Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.**
- m. **Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.**
- n. **Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi,** terutama yang berkaitan keterbatasan akses terhadap sumberdaya produktif dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.



3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. **Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.**
- b. **Belum optimumnya perhatian pada perkebunan rakyat.**
- c. Volume pemanfaatan energi dari tahun ke tahun masih bertambah , dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang. **Kesenjangan antara konsumsi dengan kemampuan memulihkan kembali, dan mengelola pemanfaatan tidak berimbang.** Suatu saat jika pemanfaatan tidak dilakukan secara berimbang, dan substitusi teknologi tidak dikembangkan, ketahanan energi akan terganggu. Hal ini terjadi karena sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan minyak yang saat ini beroperasi merupakan lapangan minyak tua (*mature*), sedangkan penambahan lapangan minyak baru tidak dapat mengimbangi laju kebutuhan minyak mentah dalam negeri.
- d. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya **konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan**, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung. Selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
- e. Rendahnya minat berinvestasi **untuk perusahaan mineral dan batubara.** Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan.
- f. **Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumberdaya manusia profesional** dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
- g. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. **Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan**



ekonomis, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang ketat pada tingkat provinsi belum dipersiapkan secara optimal. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.

- h. Masih tingginya kawasan hutan berstatus *open access* merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. **Belum jelasnya tata batas kawasan hutan** menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
- i. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya **fragmentasi habitat satwa** yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
- j. **Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia** pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.

3.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga



dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh kondisi keuangan global yang diyakini akan berdampak berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

1. Produk Domesktik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2013 mencapai Rp.21,98 Triliun, sedangkan pada Tahun 2012 sebesar Rp. 20,37 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB Tahun 2012 naik sebesar Rp 12,93 triliun, dari Rp.72,63 triliun pada Tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 85,56 triliun pada Tahun 2013.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi yang mencapai 20,73 persen; diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,24 persen; sektor listrik, gas, dan air bersih 9,27 persen; pengangkutan dan komunikasi 8,52 persen; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 7,88 persen; sektor pertanian 7,41 persen; sektor industri pengolahan 5,69 persen; sektor jasa-jasa 4,8 persen. Sedangkan sektor ekonomi yang laju pertumbuhan ekonominya terkecil pada sektor pertambangan dan penggalian 1,56 persen. Besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor konstruksi mengalami



pertumbuhan tertinggi 20,73 persen, tetapi hanya memberikan kontribusi sebesar 1,05 persen terhadap total pertumbuhan Provinsi Jambi; sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh lebih rendah sekitar 12,24 persen mampu menyumbang total pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 2,21 persen. Demikian pula halnya dengan sektor pertanian yang menyumbang total pertumbuhan sebesar 2,18 persen dengan pertumbuhan 7,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki potensi yang sangat besar di Provinsi Jambi.

PDRB Provinsi Jambi tahun 2013, berdasarkan penggunaan atau permintaan yang digerakkan oleh beberapa komponen permintaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mencapai 14,07%, diikuti oleh Perubahan Stock dengan laju pertumbuhan sebesar 10,18% dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba dengan laju pertumbuhan mencapai 7,64%. Struktur PDRB menurut penggunaan, pada komponen konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 57,74% pada tahun 2012 menjadi 54,96% pada tahun 2013; pengeluaran konsumsi Pemerintah meningkat dari 17,76% pada tahun 2012 menjadi 19,30% pada tahun 2013; komponen ekspor menurun dari 47,48% pada tahun 2012 menjadi 41,93% pada tahun 2013. Sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami peningkatan dari 17,81% pada tahun 2012 menjadi 18,63 di tahun 2013.

2. Ekspor dan Impor

a. Ekspor

Globalisasi telah memberikan salah satu peluang bagi perekonomian, khususnya dalam rangka menjalankan roda



perekonomian melalui kegiatan ekspor-impor. Oleh karenanya, kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu faktor penentu berlangsungnya kegiatan perekonomian disuatu wilayah, yang dari waktu ke waktu terus memiliki peran peting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi ekspor, realisasi nilai ekspor non migas bulan Nopember 2013 mengalami penurunan sebesar 18,38 persen dari US \$ 1.659 juta menjadi 1.354 juta bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2012. Penurunan nilai tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan dari kelompok pertanian terutama komoditi pinang sebesar 1,57 persen dan kelompok industri terutama komoditi kayu lapis dan olahan lainnya sebesar 1,20 persen. Kinerja tersebut tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi.

Sedangkan komoditi ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditi Karet, Minyak Nabati (CPO dll), Pulp dan produk Tissue. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 13 Negara, dengan 6 negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Malaysia, India dan Amerika Serikat.

b. Impor

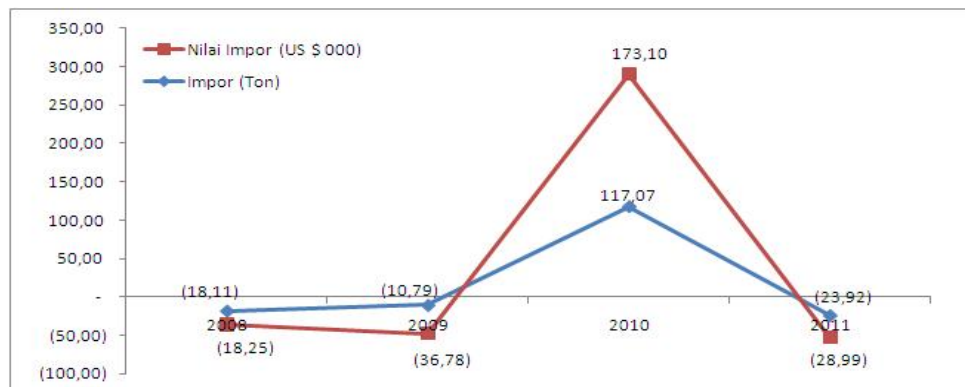
Selama kurun waktu 2007-2011 secara rata-rata volume impora Provinsi Jambi sebesar 158.227,20 ton dengan nilai impor mencapai 169.882.000 US \$. Untuk lebih lengkapnya perkembangan volume impor dan nilai impor Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Perkembangan Volume Impor dan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2007-2011

Tahun	Impor (Ton)	Nilai Impor (US \$ 000)
2007	148.102	178.892
2008	121.285	146.251
2009	108.197	92.459
2010	234.862	252.504
2011	178.690	179.304

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Tabel tersebut secara jelas memperlihatkan fluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana yang diperlihatkan Gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.3 Grafik Laju Perkembangan Impor dan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2007-2011

Gambar tersebut menunjukkan fluktuasi yang relatif tajam baik untuk peningkatan maupun penurunan nilai impor dan volume impor Provinsi Jambi.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2013 tercatat sebesar 7,88% (yoy), lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012 (7,44% (yoy)) dan di atas pertumbuhan nasional (5,78% (yoy)). Secara triwulanan, perekonomian Jambi pada

triwulan IV-2013 tumbuh sebesar 1,94% (qtq) atau 6,93% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (2,74% (qtq) atau 7,87 (yoy)), namun masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,72% (yoy)).



Sumber: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jambi Triw.IV – 2013, Bank Indonesia, 2014

Gambar 3.4. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi dan Nasional (yoy)



Sumber: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jambi Triw.IV – 2013, Bank Indonesia, 2014

Gambar 3.5. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi dan nasional (qtq)



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

LAPANGAN USAHA	2012				2013			Triwulan IV - 2013	
	I	II	III	IV	I	II	III	QTO (%)	Andil
Pertanian	2.38	2.78	1.83	1.59	1.22	2.52	2.30	0.67	0.20
Pertambangan dan Penggalian	(7.92)	5.01	4.10	4.69	(12.76)	6.52	7.39	0.73	0.09
Industri Pengolahan	(1.42)	3.22	3.88	2.79	(1.23)	2.48	(1.14)	3.28	0.39
Listrik, Air dan Gas	1.11	1.65	2.12	6.07	1.17	1.53	0.92	1.15	0.01
Bangunan	1.52	4.11	8.80	11.91	2.02	2.54	2.02	2.80	0.16
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.07	2.24	4.44	1.83	2.41	2.98	3.42	4.78	0.89
Pengangkutan dan Komunikasi	0.07	2.57	3.95	2.37	(0.56)	2.74	4.35	1.03	0.08
Keuangan, Persewaan dan Jasa Keuangan	1.45	2.73	1.67	3.13	1.41	2.03	1.92	(0.26)	(0.02)
Jasa-Jasa	0.34	1.19	1.12	0.71	0.85	1.82	1.29	1.87	0.14
PDRB	(0.22)	2.93	3.28	2.84	(0.88)	3.00	2.74	1.94	1.94

Sumber: BPS (diolah)

JENIS PENGELUARAN	2012				2013			Triwulan IV - 2013	
	I	II	III	IV	I	II	III	QTO (%)	Andil
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	0.47	1.06	2.42	0.73	0.46	0.93	2.27	0.71	0.46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(5.27)	2.68	3.22	1.11	(7.15)	2.00	1.76	23.75	4.08
Lembaga Swasta Nirlaba	1.63	1.97	2.56	1.67	1.02	2.38	2.45	1.52	0.01
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1.21	4.22	6.84	6.42	1.05	2.11	1.94	3.08	0.57
Perubahan Stok	0.54	2.27	(2.01)	7.66	3.46	3.76	(5.69)	5.72	0.18
Ekspor	-8.77	11.58	-2.62	11.63	-15.68	14.07	3.17	(7.47)	(4.97)
Impor	-8.17	8.99	-2.26	9.45	-14.20	10.44	1.86	(2.29)	(1.61)
PDRB	(0.22)	2.93	3.28	2.84	(0.88)	3.00	2.74	1.94	1.94

Sumber: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jambi Triw.IV – 2013, Bank Indonesia, 2014

Gambar 3.5. Laju pertumbuhan ekonomi triwulanan (qto)

4. Laju Inflasi

Kinerja ekonomi Provinsi Jambi salah satunya juga ditunjukkan dengan angka inflasi. Laju inflasi Kota Jambi pada tahun 2013 berada pada posisi 8,74 persen. Inflasi terjadi pada semua kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks kelompok bahan makanan sebesar 0,07 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,76 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,54 persen; kelompok sandang sebesar 0,47 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,39 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel pada halaman berikut ini.

Tabel 3.2 Inflasi Bulanan Tahun Kalender, Year on Year Tahun 2012 - 2013

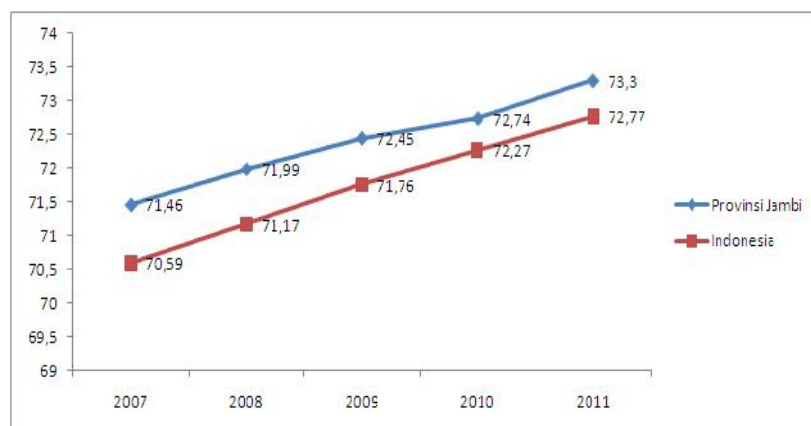
No	Inflasi	2012	2013
1	Desember	0,62	1,40
2	Desember (Tahun Kalender)	4,22	8,74
3	Desember terhadap Desember (year on year)	4,22	8,74

Sumber: Berita Resmi BPS 2014

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yang menggambarkan beberapa komponen yang meliputi capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Sampai dengan tahun 2007-2011, IPM Provinsi Jambi secara rata-rata mencapai 72,39 dan angka ini sedikit lebih tinggi dari angka IPM nasional yang mencapai 71,71. Untuk lebih lengkapnya perkembangan IPM tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Gambar 3.6 di bawah ini.



Gambar 3.6 Perkembangan IPM Tahun 2007-2011

Gambar di atas menunjukkan peningkatan IPM selama kurun waktu dari 2007-2011. Jika mengacu pada konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori tinggi dimana IPM lebih dari 80,0; menengah atas antara 66,0-79,9; menengah bawah 50,0-65,9 dan rendah IPM kurang dari 50,0. Dari angka IPM yang dicapai oleh Provinsi Jambi pada dasarnya relatif baik dimana capaian pembangunan manusia berdasarkan kategori tersebut berada pada kategori **menengah atas**.

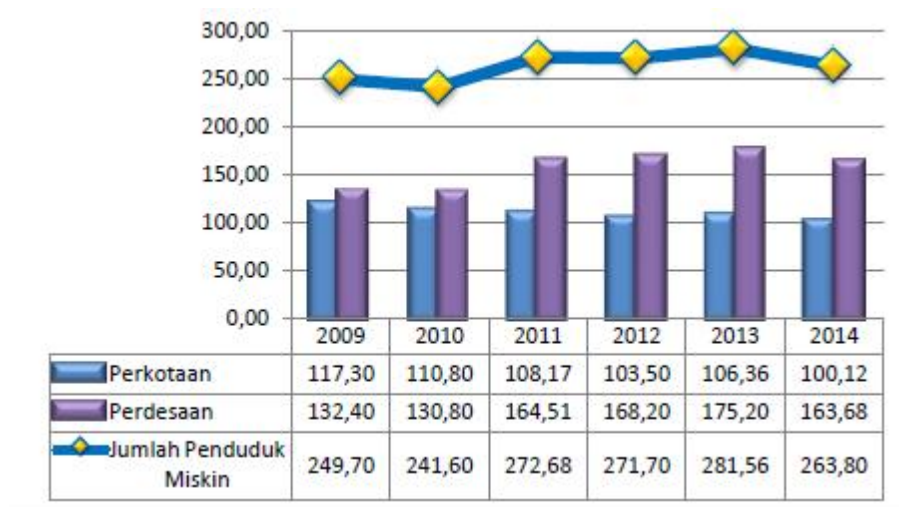
6. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi selama 2010 – 2013 rata-rata adalah 8,3% setiap tahunnya. Fluktuatif persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi tidak terlepas dari naik turunnya harga komoditas pertanian dan perkebunan, tingkat inflasi yang terjadi serta beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.



Sumber: Bappeda dan BPS Jambi Tahun, 2014

Gambar 3.7 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2014.



Sumber: Bappeda dan BPS Jambi Tahun, 2014

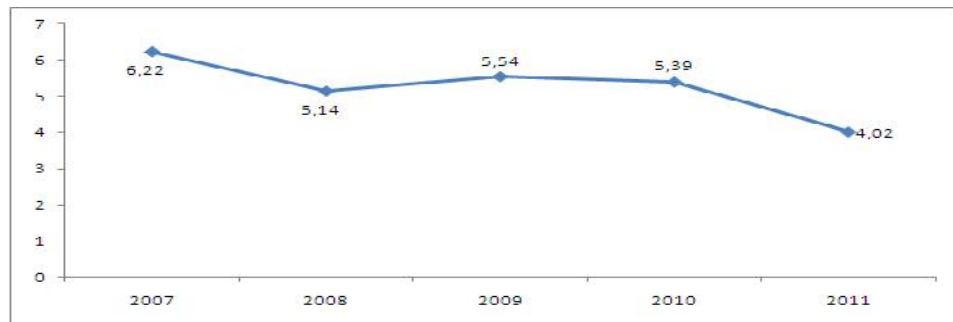
Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2014.

7. Pengangguran

Pengangguran pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi timbulnya sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian, ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja sebagai usaha peningkatankesejahteraan penduduk yang mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dimana tingkat pengangguran terbuka umumnya didefinisikan sebagai proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, dimana

ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di satu wilayah. Untuk periode tahun 2007-2011 TPT Provinsi Jambi menunjukkan trend yang berfluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.9 di bawah ini.



Gambar 3.9 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2007-2011

Gambar di atas menunjukkan fluktuasi TPT di Provinsi Jambi, pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 17,36% akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 7,78% dan kembali menurun pada dua tahun terakhir yaitu sebesar 2,71% pada tahun 2010 dan menurun cukup tajam pada tahun 2011 sebesar 25,42%.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

A. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu



pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, yang merupakan “grand strategy” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity dengan mempertimbangkan pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan fokus pembangunan nasional yaitu Pro-growth, Pro-poor, Pro-Job serta Pro-environment.
2. Menyelenggarakan reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan pemerintahan sebagai institusi publik berdasarkan prinsip good governance dan clean government agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Melaksanakan upaya percepatan pembangunan yang diarahkan pada pengembangan aktifitas sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local
4. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan akomodatif serta kolaboratif sebagai mitra kerja pemerintahan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.
5. Mendorong pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya melalui program satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE). Kebutuhan dan potensi serta permasalahan satu kecamatan akan berbeda dengan kecamatan lainnya. Melalui strategi program satu milyar satu kecamatan ini, diharapkan dapat menjaring aspirasi dari bawah, dapat mengatasi akar permasalahan yang



dihadapi oleh masyarakat dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi masing-masing kecamatan, yang pada gilirannya akan terwujud kemandirian dari kecamatan.

6. Mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur, baik pembangunan jalan dan jembatan yang mampu memperpendek jarak dari daerah produksi ke daerah pusat-pusat distribusi serta pembangunan jaringan listrik, irigasi dan air bersih.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya grand strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan;



2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan diskriminasi jender. Dalam hal ini penegakan hukum yang bersih, adil dan tidak pandang bulu;
3. Arah Kebijakan umum untuk Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional menjadi kebijakan Provinsi Jambi dengan mengedepankan pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jambi 2005 - 2025 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesejangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender.



Oleh karenanya, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan lebih diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya pemererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

Adapun Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
 - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan. Pengembangan sarana prasarana transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.
 - b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem



- jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan PKL.
 - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
 - e. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
- a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.



- b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
 - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
 - d. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
 - e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
- a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
 - c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 - d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani



kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

- e. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:
- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
 - c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
2. Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industry pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.



3. Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
5. Kabupaten tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi
6. Kota Kerinci mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
7. Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan grand strategi dan arah kebijakan umum, dirumuskan strategi dan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun.



Matrik Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015

VISI : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera			
Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur	Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum	Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan daerah belakang nya (hinterland), meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar internasional
			Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikem-bangkan untuk mendukung penin-katan pertumbuhan wilayah Jambi secara serasi dengan wilayah-wilayah lainnya
			Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/ sentra produksi yang masih terisolir dan mening-katkan akses ke pasar internasional
			Pengembangan bandara sebagai salah satu landasan internasional di Sumatra
		Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah	Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka per-cepatan pembangunan desa



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

			tertinggal
			Pengembangan Prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan intra wilayah di Provinsi Jambi yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi sungai
			Meningkatkan kelancaran pelaya-nan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan
		Pengembangan dan penataan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun	Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah
			Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik pemerintah
	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan terbarukan	Pengembangan Energi Men- ciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
			Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

			tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan
			Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya energi
	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	Ketersediaan jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata	Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendaya gunaan
			Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi
			Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis
		Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi di wilayah potensi	Penyelenggaraan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat
			Penataan system irigasi dalam mendukung peningkatan peman-faatan lahan dan produksi pertanian
			Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun
	Terpenuhinya	Menciptakan	Pemenuhan dan peningkatan



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan	kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman	kualitas Perumahan dan Permukiman
			Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir
			Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat
			Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
		Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi	Penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan secara merata sebagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat luas
			Peningkatan ketersediaan jaringan transportasi dalam mendukung mutu pendidikan pada wilayah-wilayah terpencil dan sulit terjangkau
		Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan kesehatan secara merata	Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan kesesuaian sarana prasarana dan tenaga medis secara merata
			Pendayagunaan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan mobilisasi kesehatan



Misi II : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti standar Pendidikan nasional	1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas
			Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik
		2. Penataan sistem pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh indikator pendidikan yang lebih baik	Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan
			Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat)
			Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel untuk melanjutkan usaha-usaha



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

			pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas
	Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dan kualitas manusia daerah Jambi
			Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan
			Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam memacu prestasi dan prestise daerah
	3. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial
			Mengembangkan dan menyalurkan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

			Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu
			Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini
			Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar
			Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan	Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB
			Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas



	penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan		
	Terwujudnya kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama	Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta mengembangkan upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat
	Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu	1. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah	Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Provinsi Jambi



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan		Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan
			Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan menedepankan budaya leluhur



Misi III : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Jambi dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi	Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik	Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik
			Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Provinsi Jambi
	Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan	Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata	Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi
			Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi
			Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK
	Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD	Peningkatan daya saing BUMD dalam	Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), (transparansi, akuntabilitas,



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah	pembangunan daerah	keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat	Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah	Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau
			Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
			Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat
			Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
		Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah	Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi



		dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas	Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif
			Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM
			Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
			Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif
		Menciptakan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari	Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan), dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan
		meningkatnya peran sektor pertanian dan	Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

		non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal
	Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial
			Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial
			Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
			Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran	Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran	Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

			Meningkatkan kualitas SDM kete- nagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja
	Terwujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama	Menciptakan upaya peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama
			Meningkatkan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
	Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataa daerah	Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah	Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri
			Optimalisasi dan sinkronisasi da- lam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang meli- batkan lebih dari satu moda transportasi
			Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat
	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan	Menciptakan pusat per- tumbuhan wilayah yang berdaya saing	Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	pembangunan antar wilayah		yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal
			Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya



Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Alam, Lahan dan Tambang	Menyelenggarakan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
			Pengamanan ketahanan pangan
			Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan
			Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu
		Menyelenggarakan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan yang baik	Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya
			Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan
			Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal
			Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang sesuai dengan peran dan fungsinya



			Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan Memperketat persyaratan reklamasi
	Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar	Membuka peluang usaha tambang dengan didukung oleh aspek lingkungan dan sosial	pasca tambang perusahaan pertambangan Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup Meningkatkan kapasitas lembaga
			pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana Membangun kesadaran masyarakat
			agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
		2. Mengurangi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta resiko Bencana Alam	



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

		Peningkatan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan hasil produksi perikanan	Mengelola sumber daya kelautan secara lestari Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya kelautan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Pengurangan emisi dan peningkatan serapan dan simpanan karbon dari kegiatan konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan restorasi ekosistem	Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung
			Peningkatan upaya reboisasi hutan di kawasan hutan terdeforestasi secara transparan, akuntabel dan partisipatif, terutama di dalam kawasan hutan
			Menciptakan perencanaan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan, proyeksi perluasannya dan pemberian izin tidak pada kawasan hutan dan kawasan lain yang memiliki tutupan hutan yang masih dalam keadaan baik
	Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang	Teciptanya sinkronisasi operasional penataan ruang wilayah	Mensinergiskan konsep penataan ruang Provinsi Jambi dengan RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah)



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

	berkelanjutan		Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi
			Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan tata ruang yang berpedoman pada produk hukum daerah



Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesenjangan Gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan Umum	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	Terciptanya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Menciptakan kondisi kerja yang baik yang didukung dengan kemampuan SDM perencana yang berkualitas dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan secara sinergi sesuai dengan peraturan yang berlaku
			Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah
			Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik
		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur



		tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
			Pembentukan birokrasi yang profesional dengan membangun apa-ratur pemerintah Provinsi Jambi yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN
			meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi
			Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat
		Mewujudkan kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan	Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui optimalisasi sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan
			Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan



		berbasis teknologi informasi	
			Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional ber-dasarkan kebutuhan nyata daerah, hierarki pendek, bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesen-tralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya
			Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan
	Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum	Menciptakan budaya kerja yang berdasarkan pada ketaatan akan hukum dan perundang-undangan	Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum
			Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

			Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement)		Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat
			Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
			Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
			Pembinaan aparatur yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar



BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN PROVINSI JAMBI

4.1. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Pertama

Misi 1 : Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	75 %
		2. Persentase luas daerah irigasi yang fungsional	66,35%
		3. Panjang Sungai yang telah dinormalisasi	41.450 m
		4. Persentase rumah tangga sangat miskin yang mendapatkan rumah layak huni	74,35 %
		5. Rasio elektrifikasi	82 %
		6. Persentase Desa yang menggunakan energi baru dan terbarukan	9 %
		7. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	62,41%
		8. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	68,87%



4.2. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kedua

Misi 2 : Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	1. Indeks Pembangunan Manusia	73,8
		2. Angka rata-rata lama sekolah	8,5 th
		3. Angka melek huruf	99 %
		4. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD (%) - SMP (%) - SMA (%)	100 80 65,9
		5. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	24
		6. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran	118
		7. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	15 %
		8. Persentase puskesmas yang berkinerja baik	75 %



4.3. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Ketiga

Misi 3 : Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif, peningkatan kepariwisataan daerah, serta terselenggaranya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	1. Nilai investasi PMA	1.101.354 US \$
		2. Nilai investasi PMDN	20.656,23 T
		3. Nilai ekspor	2.000 juta US \$
		4. Persentase koperasi aktif	78,01%
		5. Laju inflasi provinsi	5,53
		6. Pertumbuhan industri pariwisata	700 industri
		7. Pertumbuhan kunjungan wisata	1.328.500 orang
		8. Persentase kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	24,3 %
		9. Nilai Tukar Petani	100 - 102
		10. Ketersediaan energi/kap/hari	< 3.527 kkal/kap/hr
		11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,4%



4.4. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Keempat

Misi 4 : Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kualitas dan kelestarian sumber daya air, lahan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup	• Penurunan titik api (hot spot)	300 titik
		• Luasan lahan tertutup pohon	64,80%
		• Penurunan emisi gas rumah kaca	17,25 Mt CO ₂



4.5. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kelima

Misi 5 : Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Opini BPK	WTP
		3. Skor Integritas pelayanan publik	8
		4. Indeks persepsi korupsi	5,0
		5. Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		7. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai CC	80%
		8. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi	75
		9. Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	50%



BAB V

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS

5.1. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas untuk Pencapaian sasaran dari Misi Pertama

Misi 1 : Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.juta)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	Persentase jalan dalam kondisi mantap	75%	- Program pembangunan jalan dan jembatan - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan - Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan - Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	329.717,77 73.078,84 7.154,91 1.632,21 21.325,03	PU PU Dishub Dishub PU



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
		Panjang Sungai yang telah dinormalisasi	41.450 m	1. Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	86.411,51	PU
		Persentase luas daerah irigasi yang fungsional	66,35%	1. Program pengembangan dan pengelolaan, irigasi, rawa dan jaringan pengairan	95.987,96	PU
		Persentase rumah tangga sangat miskin yang mendapatkan rumah layak huni	74,35%	1. Program Pengembangan Perumahan	12.396,45	PU
		Rasio elektrifikasi	82%	1. Program pengembangan energi	7.249,26	ESDM
		Persentase desa yang memakai energi baru dan terbarukan	9 %	2. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	423,53	ESDM
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	62,41%	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	366,6 14.680,29 21.101,57	Dinkes PU PU



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan.	68,87%	1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	16.824,42	PU

Jumlah Anggaran tahun 2015 adalah Rp. 688,35 Milyar

5.2. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kedua

Misi 2 : Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan social	• Indeks Pembangunan Manusia	73,8	1. Program Pendidikan Non Formal	11.056,82	Disdik
		• Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,5 Tahun			
		• Angka Melek Huruf	99%			



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
		- Angka Partisipasi Murni (APM) - SD - SMP - SLTA		1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5. Program Pendidikan Luar Biasa	33.454,91 131.137,55 15.000 26.544,78 13.010.,63	Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik
		- Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran hidup - Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran - Prevalensi Kekurangan gizi pada balita - Persentase puskesmas yang berkinerja baik	24 118 15% 75%	1. Program upaya kesehatan masyarakat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Perbaikan gizi masyarakat	725,24 909,92 3.685	Dinkes Dinkes Dinkes



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
				4. Program Pengadaa n, Peningkata n Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru- paru/ RS Mata	69.694,72	Dinkes
				5. Program Pemeliha aan Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru- paru/ RS Mata	1.871,07	Dinkes
				6. Program Peningkata n Pelayanan Kesehatan	90.000	Dinkes

Jumlah Anggaran tahun 2015 adalah Rp. 384,08 Milyar



5.3. Rencana Kebutuhan Dana untuk Pencapaian sasaran dari Misi Ketiga

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran: 2015

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif, peningkatan kepariwisataan daerah, serta terselenggaranya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	• Laju inflasi Provinsi • Nilai Investasi PMA • Nilai Investasi PMDN • Nilai Ekspor	5,53 1.101.354 US \$ 20.656,23 T 2.000 Juta US\$	1. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.736,09 210,18 351,49 1.180,83	BPMD dan PPT BPMD dan PPT BPMD dan PPT Dinas Perindag



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
				5. Program Pengembangan industri kecil dan menengah	2.278,46	Dinas Perindag
				6. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	344,27	Dinas Perindag
				7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	389,47	Dinas Perindag
				8. Program Penataan Struktur Industri	205,38	Dinas Perindag
				9. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri	814,4	Dinas Perindag
				10. Program Pengembangan Standarisasi Nasional	1.219,62	
		• Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil	65.500	1. Program Pengembangan sistem Pendukung UMKM	2.943,99	Diskop dan UMKM
				2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Koperasi UKM	1.811,01	Diskop dan UMKM



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Koperasi Aktif	78,01%	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.012,94	Diskop dan UMKM
		- Pertumbuhan Industri Pariwisata - Jumlah Kunjungan Wisatawan	700 industri 1.328.500 orang	1. Program Pengembangan Destinasi	8.766,83	Dinas Budpar
		- Persentase kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB - Nilai Tukar Petani - Ketersediaan energi/kap/ hari - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	24,3% 100 – 102 <3.527 kkal/kap/hr 91,4%	1. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan 4. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	1.669,31 28.498,61 5.346,51 3.027,94	Dinas Pertanian TP dan Dinas Perkebunan Dinas Pertanian TP dan Dinas Perkebunan Dinas Pertanian TP dan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Keswan



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
				5. Program Peningkatan Produksi Peternakan	10.331,25	Dinas Peternakan dan Keswan
				6. Program Pengembangan Usaha Peternakan	635,2	Dinas Peternakan dan Keswan
				7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Nelayan	2.996,88	Dinas Pertanian TP, DKP dan Dinas Perkebunan
				8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2.716,12	Bakorluh
				9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.582,46	BKP
				10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	11.300,70	DKP
				11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.695,33	DKP

Jumlah Anggaran tahun 2015 adalah Rp. 94,04 Milyar



5.4. Rencana Kebutuhan Dana untuk Pencapaian sasaran dari Misi Keempat

Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2015

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.juta)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya kualitas dan kelestarian sumber daya air, lahan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup	• Penurunan titik api (Hot Spot)	300 titik	1. Program Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	234,3	Dishut
		• Luasan lahan tertutup pohon	64,80%	1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3.095,89	Dishut
		• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17,25 Mt CO ₂	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.878,25	Dishut
				3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	120	BLHD



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
				4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	3.740,26	BLHD
				5. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	1.582,99	BLHD
				6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	137,1	BLHD
				7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan	252,5	BLHD

Jumlah Anggaran tahun 2015 adalah Rp. 11,04 Milyar



5.5. Rencana Kebutuhan Dana untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kelima

Misi 5 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan Gender

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran: 2015

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	• Persentase temuan yang ditindaklanjuti • Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah • Skor integritas pelayanan publik • Indeks Persepsi Korupsi • Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Persentase SKPD yang mendapatkan nilai baik (CC) • Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi	100% WTP 8 5,0 100% A 80% 75	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 3. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah 4. Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh	6.924,04 4.880,28 4.772,52 729,65	Inspektorat BPKAD BPKAD Badan Kesbangpol



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
		Partisipasi angkatan wanita kerja	50%	5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat 8. Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	639,87 894,82 742,78 351,49 226,12	Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
				10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	4.106,85	Seluruh SKPD
				11. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	1.249,58	BPMPP
				12. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	420,42	BPMPP
				13. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	350	BPMPP



Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7
				14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	1.192,86	BPMPP

Jumlah Anggaran tahun 2015 adalah Rp. 27,48 Milyar



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi tahun 2015 ini merupakan dokumen perencanaan yang strategis karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015. Laporan tersebut akan dibuat pada tahun 2016 mendatang berdasarkan hasil capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 berdasarkan indikator acuan seperti yang termuat dalam rencana kinerja tahunan ini. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah perlu memperhatikan indikator capaian kinerja agar peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi dapat ditingkatkan.

